



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS SOSIAL

Jl. Jendral Ahmad Yani No.38 Blitar Telp./Fax. (0342) 801357

website : www.dinsos.blitarkab.go.id

email : dinsos@blitarkab.go.id

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS SOSIAL
TAHUN 2021 - 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPM, RTRW dan RPJMN. RPJMD merupakan pedoman bagi semua OPD, dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra OPD).

Dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Blitar, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang baru sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka OPD harus menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang tertuang di dalam dokumen RPJMD.

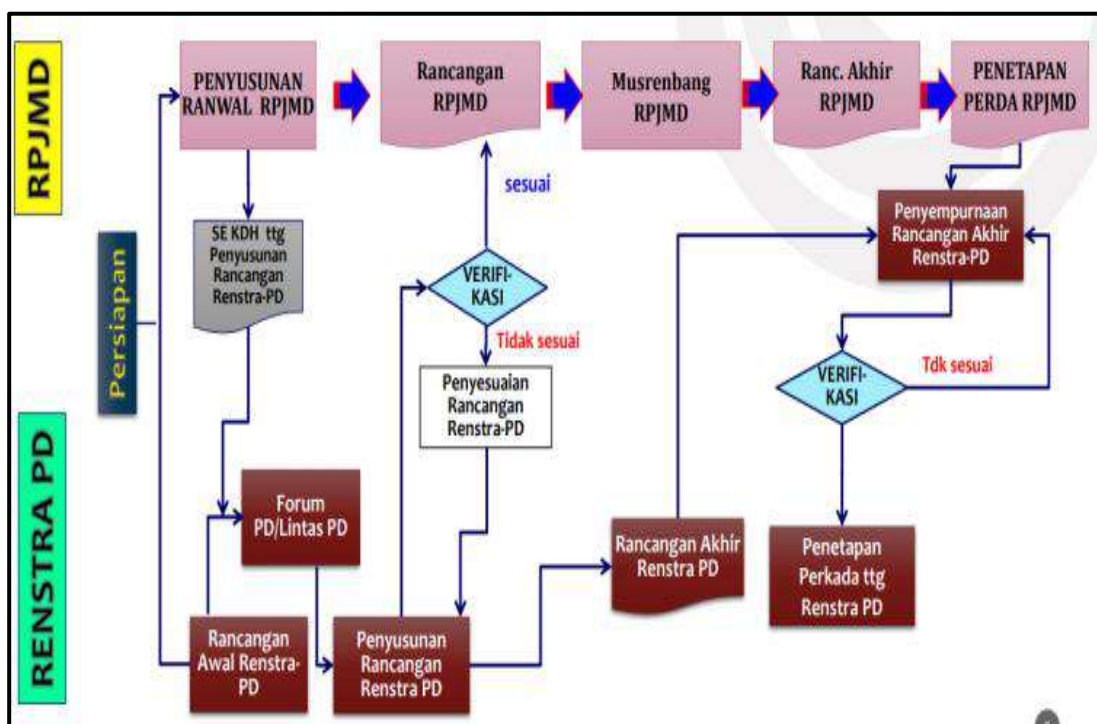
Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar mempunyai kedudukan sebagai pedoman arah dan pelayanan dalam penyelenggaraan Dinas Sosial serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa timur yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan penentuan program kegiatan sehingga dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, linier antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

Tahapan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) OPD berpedoman pada Permendagri No.86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (1). Adapun tahapan tersebut meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan renstra OPD. Adapun keterkaitan tahapan penyusunan renstra OPD dengan dokumen RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra OPD Dengan RPJMD



Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan tugas yang terkait langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, namun karena kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dan dinas terkait lainnya, untuk itu diperlukan persepsi dan pemahaman yang sama baik dalam konsepsi program maupun implementasi dan administrasi / pengelolaan serta komitmen yang kuat antara penanggung jawab program sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawab masing - masing.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang dipakai sebagai landasan hokum dalam rangka menyusun perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27, 28 B, 33 dan 34;

- 2) Undang-Undang RI Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan;
- 3) Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 5) Undang-Undang RI no. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvesi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 6) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 7) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 8) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 9) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial lanjut Usia;
- 10) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 11) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 12) Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 13) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 14) Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 15) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 16) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 17) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 18) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah;
- 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 20) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 23) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
- 24) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 27) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 28) Keppres RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- 29) Keppres RI No. 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi dan Pengembangan Generasi Muda;
- 30) Keppres RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 31) Keppres RI No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- 32) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana;
- 33) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
- 34) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
- 35) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsi dan Perlindungan;
- 36) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- 37) Peraturan Menteri Sosial Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 - 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 - 42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
 - 43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 - 44) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 45) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor: 120.1/010/012/2004 Dan Nomor: 460/149/409.114/2004 Tentang Kerjasama Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Khususnya Anjal, Wts, Gelandangan, Pengemis Dan Gelandangan Psikotik;
 - 46) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
 - 47) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013;
 - 48) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
 - 49) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 50) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

- 51) Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 yaitu : memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Selain itu, Renstra juga sebagai kendali dalam menentukan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan sebagaimana target yang telah direncanakan demi mewujudkan visi Bupati terpilih yaitu : **Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia, baldatun, toyyibatun, warobbun ghofur.**

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Organisasi Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun renstra, terdapat tata cara dan sistematika penulisan yang telah di atur dalam Permendagri No.54 tentang penyusunan renstra Perangkat Daerah. Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu:

- 1.1.1. Penetapan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 1.1.2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- 1.1.3. Pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 1.1.4. Pembinaan unit pelaksana teknis;
- 1.1.5. Pengoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- 1.1.6. Pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris memiliki fungsi yaitu:

- a) Perumusan kebikakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- b) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;

- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan;
- e) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f) Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- j) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- k) Pengelolaan kearsipan;
- l) Pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- m) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan penenmaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e) Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g) Menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h) Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

2.1.2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dalam wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- d) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- e) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.1.3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi kegiatan fasilitasi pengungsi, bantuan dan Perlindungan Sosial serta melaksanakan pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki fungsi yaitu:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.1.4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial, penyandang disabilitas, pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-Lembaga Sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- g) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan

- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.5. Bidang Penanganan Bencana

Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dalam wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penanganan Bencana mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penanganan bencana; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.6. Unit Pelaksana Teknis

- a) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- b) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- c) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang- undangan

- d) Jabatan Fungsional diduduki oleh Pejabat Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan
- e) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang
- f) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang
- g) Subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan tugas Subkoordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan tenaga yang tersedia untuk menyokong dan melaksanakan tugas - tugas OPD yang termuat dalam tupoksi demi mewujudkan visi dan misi OPD. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja OPD yang sudah ditentukan.

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh dinas sosial berjumlah 49 orang, yang terdiri dari 24 orang laki - laki dan 25 orang perempuan. Dari 24 orang laki- laki tersebut, sejumlah 15 orang berstatus PNS dan 9 orang berasal dari tenaga harian lepas. Sedangkan dari 25 orang perempuan, sejumlah 19 orang berstatus PNS dan 6 orang berasal dari tenaga harian lepas. Apabila dari keseluruhan jumlah SDM tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis jabatannya, maka akan diperoleh data sesuai tabel berikut ini.

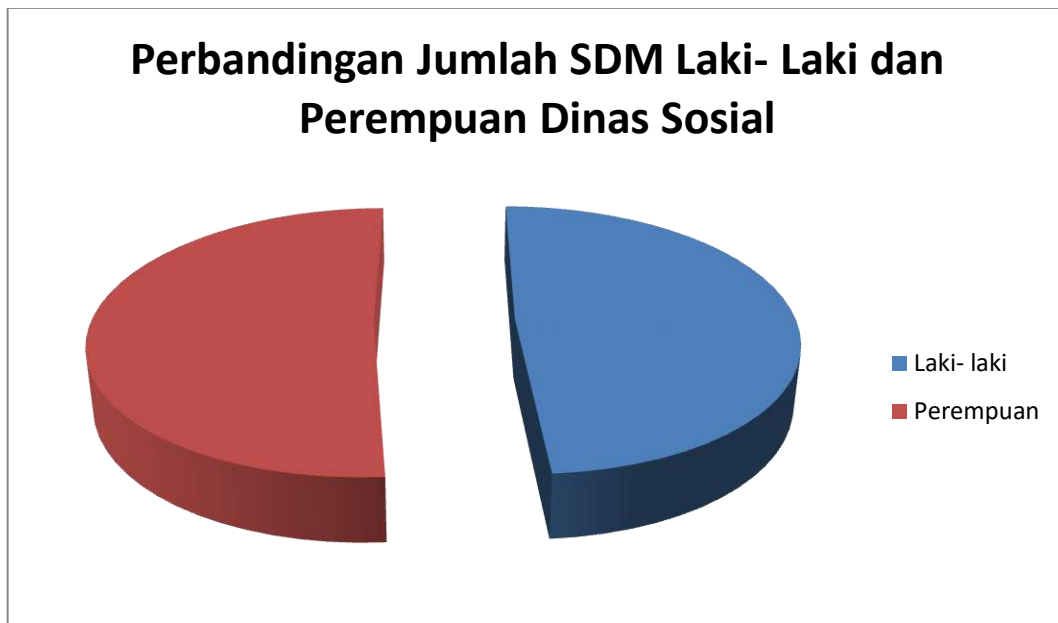
Tabel 2.1

Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasar Kepangkatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah SDM
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekertaris Dinas	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	17
5	Jabatan Fungsional Umum	11
6	Tenaga Harian Lepas	15
	TOTAL	49 Orang

Jika jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial tersebut dibagi- bagi menurut tupoksi yang dibebankan serta sesuai dengan struktur organisasi Dinas Sosial, maka diperoleh kondisi bahwa Dinas Sosial masih memerlukan tambahan SDM untuk melaksanakan tupoksinya dengan maksimal karena pada setiap satu sub kegiatan, idealnya memiliki dua orang staf untuk membantu pelaksanaan tugas - tugas sesuai tupoksinya. Adapun jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, maka diperoleh jumlah SDM Dinas Sosial yaitu 21 orang laki- laki dan 22 orang perempuan sesuai kurfa berikut:

Gambar 2.1
Perbandingan Jumlah SDM Dinas Sosial



Tabel 2.2
Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Jenis Golongan	Jumlah
1	IV / C	1 Orang
2	IV / B	1 Orang
3	IV / A	6 Orang
4	III / D	8 Orang
5	III / C	2 Orang
6	III / B	7 Orang
7	III / A	7 Orang
8	II / D	2 Orang

Untuk menunjang kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Sosial memiliki sejumlah aset. Adapun aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Data Aset Dinas Sosial

No	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah	2	Tempat
2	Mobil Dinas	8	Buah

No	Nama Aset	Jumlah	Satuan
3	Ambulan	1	Buah
4	Motor Dinas	20	Buah
5	Filling Besi	11	Buah
6	Lemari kaca	11	Buah
7	Proyektor	3	Buah
8	Kursi Kerja	38	Buah
9	Personal Computer	19	Buah
10	Laptop	29	Buah
11	Printer	27	Buah
12	Lemari kayu	8	Buah
13	Penghancur Kertas	1	Buah
14	Papan Nama Instansi	2	Buah
15	Papan pengumuman	2	Buah
16	Meja Kerja Pejabat	18	Buah
17	Kursi Kerja Pejabat	18	Buah
18	Gedung/Bangunan	9	Buah
19	Kursi Lipat	110	Buah
20	AC	13	Buah
21	Meja Resepsionis	1	Buah
22	Rak Kayu	2	Buah
23	Tempat Tidur Kayu	8	Buah
24	Kasur	8	Buah
25	Meja Komputer	3	Buah
26	Tangki Semprot	3	Buah
27	Lemari Es	2	Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan OPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/ kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/ kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian

kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Berdasarkan Perencanaan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan kinerja instansi maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar melakukan penilaian kinerja Tahun 2020, penilaian kinerja dimaksud dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak). Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik dan non fisik. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut (input, output, outcome, benefit dan impact) maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung nilai capaian indikator kinerja yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Pemerintah Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PPKS yang dibantu dan ditangani		5%		5%	5%	5%	5%	5%	4.44%	7.18%	2.54%	4.83%	5.90%	88%	143%	50%	96%	118%
2	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial		20%		20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PPKS yang dibantu dan ditangani, ditargetkan sebesar 5 %. Pada akhir tahun 2016 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 4.44 % dengan rasio capaian sebesar 88 %. Pada akhir tahun 2017 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 7.18 % dengan rasio capaian sebesar 143 %. Pada akhir tahun 2018 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 2.54 % dengan rasio capaian sebesar 50 %. Pada akhir tahun 2019 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 4.83 % dengan rasio capaian sebesar 96 %. Pada akhir tahun 2020 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 5.90 % dengan rasio capaian sebesar 118%. Hal ini terjadi karena:

- a) Adanya **Permendagri No.86 tahun 2017** tentang: Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang mengatur formula tata cara perhitungan jumlah PMKS yang dibantu dan ditangani sehingga menghasilkan angka capaian yang berbeda juga dari tahun-tahun sebelumnya.
- b) Meningkatnya capaian realisasi kinerja di tahun 2020 (sebesar 5.90%) dari tahun 2019 (sebesar 4.83%) dikarenakan adanya perbaikan sistem pencatatan hasil kinerja masing-masing seksi sehingga lebih akuntabel dan teliti.
- c) Data capaian tersebut merupakan PMKS yang dibantu dan ditangani dari dana yang berasal dari APBD saja sehingga realisasinya hanya mencapai 5.90% dari total PPKS yang ada.
- d) Bantuan paling banyak diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program keluarga Harapan (PKH), Peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), Bantuan pangan non tunai (BPNT), dan Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Kemudian dari Pemerintah Provinsi yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tugas dari pemerintah daerah merupakan fasilitator dari pelaksanaan program-

program tersebut sehingga tidak masuk perhitungan dalam PPKS yang dibantu dan ditangani.

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis yang kedua diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator kinerja yaitu persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, ditargetkan sebesar 20% dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2016 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2017 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2018 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2019 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %. Pada akhir tahun 2020 realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 20 % dengan rasio capaian sebesar 100 %.

Hal ini terjadi karena:

- a) Komponen PSKS yang ada di Kabupaten Blitar antara lain: ASN, Tagana, Pemuda Kampung Siaga Bencana, Toga Tomas, Pendamping PKH, TKSK, Operator Desa dan Pendamping Desa, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten.
- b) Seluruh PSKS terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga capaian kinerja mencapai 100% setiap tahunnya.
- c) Salah satu contohnya adalah program BPNT. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten berperan dalam mengkoordinasikan antara penerima manfaat, pendamping BPNT dan stakeholder yang terlibat dalam distribusi BPNT. TKSK berperan sebagai pendamping resmi di 22 kecamatan. PKH berperan sebagai pendamping peserta PKH penerima BPNT saat pengambilan bantuan dan pengurusan administrasinya. Operator desa dan pendamping desa berperan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.

Tabel 2.5**Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RPJMD/RENSTRA**

Indikator kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)	27 PA	27 PA	100%
Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	100 %	98 %	98 %
Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	100 %	95 %	95 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga indikator kinerja yang menjadi sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang pertama yaitu Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang memiliki target sebanyak 27 PA (Panti Anak), dan hingga akhir tahun 2022 terealisasi sebanyak 27 PA. Dari data tersebut, diketahui tingkat kemajuan untuk indikator tersebut yaitu 100%. Hal ini dikarenakan jumlah panti anak yang ada di Kabupaten Blitar muncul tanpa banyak intervensi dari pemerintah Kabupaten. Panti anak ini muncul dengan diprakarsai oleh masyarakat yang peduli dan menjadi agen PSKS atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sehingga Dinas Sosial hanya melaporkan jumlahnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kepedulian masyarakat yang mendirikan panti anak, mayoritas dipelopori oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar.

Indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang memiliki target sebesar 100 % dan hingga akhir tahun 2022 terealisasi sebesar 98 %. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan targetnya kemudian dibuat persentase, maka akan diperoleh hasil sebesar 98 %. Persentase PMKS yang diberi

bantuan pada tahun 2022 jumlahnya sangat banyak hingga melebihi target karena berbagai hal, antara lain:

1. Transisi pandemi Covid-19 ke era normal baru. Di mana dalam pelaksanaan era normal baru memerlukan penyesuaian dari masyarakat. Perlunya dukungan dari pemerintah turut menjadikan pertimbangan akan pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
2. Kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini memicu perlunya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin terutama rumah tangga miskin dan pelaku usaha rintisan yang tergolong miskin.
3. Adanya inflasi tahun 2022 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan minyak goreng. Inflasi ini turut menyebabkan kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Blitar sehingga diperlukan adanya sokongan atau bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.
4. Terdapat beberapa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, antara lain: Program sembako, PBIN, PBID PBID Kabupaten Blitar, PKH, serta JPS Provinsi Jatim, Fasilitas subsidi minyak goreng, bantuan dampak inflasi, serta subsidi BBM. Tugas dari pemerintah daerah pada program bantuan sosial tersebut yaitu memfasilitasi penyaluran bantuan sosial. Oleh karenanya capaian kinerja dari program-program tersebut dapat dihitung dengan target sesuai yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial maupun Provinsi melalui DTKS.
5. Adapun jenis- jenis golongan PMKS yang diberi bantuan terdiri dari korban bencana alam, korban bencana sosial, orang penyandang disabilitas dan Penyandang penyakit kronis, dan keluarga fakir miskin. Jumlah masing- masing golongan yang diberi bantuan yaitu seperti rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.6**Rincian Jenis PMKS yang Dibantu Tahun 2017-2022**

Jenis PMKS yang dibantu	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Korban bencana alam	124	910	145	35	1.000	537	1.000	17.300	1.000	4.274	1.000	894
Korban bencana sosial	11	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Orang penyandang disabilitas dan penyandang penyakit kronis	3.674	110	4.699	109	0	0	4.414	227	300	620	500	409
Keluarga Fakir Miskin	656	656	12.914	1.655	1.027	1.027	9.577	2.791	1.154.226	1.153.549	100.000	90.831
Anak dan Lansia penghuni panti	2.000	3.900	2.000	1.260	2.000	3.132	2.000	1.475	0	0	250	242

*Dalam satuan orang

Indikator kinerja yang ketiga yaitu Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki target sebesar 100% dan hingga akhir tahun 2022 terealisasi sebesar 96.7%. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan targetnya kemudian dibuat persentase, maka akan diperoleh hasil sebesar 96.7%. Persentase PMKS yang ditangani pada tahun 2022 jumlahnya tidak mencapai 100% dikarenakan:

1. Fasilitasi program sembako PPKM tidak mencapai 100% karena KKS tidak tersalurkan. Hal ini dikarenakan KPM pergi ke luar negeri menjadi TKI ke luar negeri, KPM meninggal, KPM pindah alamat/alamat tidak ditemukan, KPM sudah mampu, menerima bantuan ganda/ dobel bantuan
2. Adapun jenis- jenis golongan PMKS yang diberi bantuan terdiri dari korban bencana alam, korban bencana sosial, orang penyandang disabilitas dan Penyandang penyakit kronis, dan keluarga fakir miskin. Jumlah masing- masing golongan yang diberi bantuan yaitu seperti rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.7**Rincian Jenis PMKS yang Ditangani pada tahun 2017-2022**

Jenis PMKS yang ditangani	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Keluarga bermasalah sosial psikologis	136	27	194	43	111	42	111	32	50	35	50	35
Keluarga fakir miskin	n/a*	n/a*	800	650	850	850	134.416	8.501	1.154.226	1.153.549	1.800.000	1.779.495
Gelandangan dan gelandangan psikotik	n/a*	n/a*	38	15	39	17	39	11	200	260	150	120
Penyandang disabilitas/ orang dg kecacatan	3.674	500	915	515	915	560	4.414	227	200	260	200	182
Pekerja seks komersial/ Tuna Susila	82	17	16	0	19	0	19	0	0	0	15	12
Anak Jalanan	94	46	20	10	22	0	22	0	0	0	0	0
Anak berhadapan dengan hukum	110	49	18	0	20	0	20	0	19	19	35	31

Sumber : Dinas Sosial

* Dalam satuan Orang

* n/a : Data tidak diketahui

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kab.Blitar

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)
Belanja Langsung	7.613.661.150	8.857.944.300	8.949.839.250	9.677.403.097	6.579.168.248	6.732.091.706	7.657.235.132	7.899.361.316	8.836.871.162	6.270.884.130	88.42 %	86.4 %	88.26 %	91.31 %	95.31%	0.1%	0.1%

Sumber : Dinas Sosia

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa anggaran Dinas Sosial Kab.Blitar berada dalam kisaran 6M hingga 8M. Mengingat besarnya jumlah PMKS yang harus dibantu dan di tangani maka tidak semua PMKS diberi bantuan dan penanganan dari anggaran yang berasal dari pemerintah daerah. Adapun bantuan paling banyak berasal dari pemerintah pusat (berupa PKH dan PBI, pemerintah provinsi (bantuan permakanan untuk disabilitas berat dan KUBE), sementara pemerintah daerah berperan dalam fasilitasi bantuan sosial tersebut. Realisasi anggaran Dinas Sosial per tahun rata-rata berada di kisaran 80% dari anggaran total. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain dana bantuan untuk bencana baru bisa dicairkan jika terdapat bencana besar di Kab.Blitar sehingga jika pada tahun tersebut tidak ada bencana maka dana tersebut akan menjadi silpa dan penyerapan Dinas Sosial menjadi turun. Kemudian untuk tahun ke-5 realisasi anggaran besar karena terdapat pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana untuk bantuan korban bencana dapat direalisasikan dengan maksimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan suatu keadaan di masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Blitar, dapat diketahui bahwa tantangan Dinas Sosial di lima tahun yang akan datang tidaklah mudah. Hal ini didasarkan pada beberapa kondisi yang memang masih sangat membutuhkan penanganan yang serius.

Berdasarkan dokumen RPJMD, diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.5888,79 km² atau 158,88 Ha yang terbagi kedalam 22 kecamatan, 248 desa dan 24 kelurahan. Data BPS Kabupaten Bitar mencatat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.231.010 jiwa bertambah 7.265 jiwa dari tahun 2020 yang sebanyak 1.223.745 jiwa. Kemudian jika di sandingkan dengan data kemiskinan ekstrem, jumlah rumah tangga miskin yaitu 135.180 rumah tangga. Dengan banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang ada, maka dirasa perlu untuk membuat kebijakan baru untuk menurunkan jumlah PMKS yang ada.

Kondisi Topografis Kabupaten Blitar terdiri dari pegunungan, dataran, dan pesisir dengan sepanjang sisi selatan berada di tepi pantai. Selain memberikan potensi yang positif bagi pengembangan Kabupaten Blitar, juga dapat memberikan dampak negatif bencana alam yang cukup beragam, antara lain:

1. Daerah rawan tsunami berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar, meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung
2. Daerah rawan bencana gunung berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Srengat
3. Daerah rawan banjir meliputi wilayah di sepanjang aliran sungai Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan
4. Daerah rawan angin puting beliung yaitu Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan kumpulan dari hal – hal yang berpotensi sebagai faktor penunjang keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar, maka dapat dirumuskan beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial, antara lain:

1. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang turut membantu Dinas Sosial dalam mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, antara lain TAGANA, PKH, TKSK, Peksos, Pensos, Korda dan Kampung Siaga Bencana. Tagana turut memberikan bantuan tenaga, seperti mendirikan dapur umum serta membantu proses trauma healing bagi korban bencana alam dan sosial. PKH memberikan bantuan program-program kementerian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin, seperti bantuan uang untuk ibu hamil miskin, bantuan uang SPP untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin, pendataan peserta penerima beras sejahtera (Rastra). TKSK memberikan bantuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data PMKS, pendampingan pendistribusian dan pembagian Rastra bersama PKH, pendampingan pendistribusian dan pembagian KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) bersama PKH. Peksos

memberikan bantuan tenaga pendampingan untuk PMKS yang membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi.

2. Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki empat bidang, yang pertama yaitu bidang rehabilitasi sosial yang memiliki tugas utama merehabilitasi PMKS yang perlu direhabilitasi, contohnya adalah penderita psikotik maupun lansia terlantar. Seringkali saat ditemui, penderita psikotik dan lansia terlantar tersebut ditemukan dalam kondisi sakit sehingga memerlukan bantuan penanganan dari dinas kesehatan/puskesmas terlebih dahulu sebelum akhirnya direhabilitasi oleh Dinas Sosial. Yang kedua yaitu bidang pemberdayaan sosial yang memiliki tugas utama terkait kelembagaan sosial, contohnya LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) yang menangani keluarga bermasalah. Kemudian, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang memiliki kerja sama dengan Dinas Kesehatan terkait Penerima Bantuan Iuran, Bea Cukai Kabupaten Blitar, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan untuk mendapatkan data buruh tani tembakau, serta Satpol PP selaku sekretariat dari DBHCHT. Kemudian, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan BPBD terkait penanganan bencana.

3. Adanya bantuan dari pusat (APBN)

Dengan tingginya jumlah PMKS yang ada di kabupaten Blitar, sementara jumlah APBD Kabupaten Blitar yang terbatas mengakibatkan kurangnya anggaran Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS. Untuk itulah, Dinas Sosial secara aktif meminta bantuan dana dari pusat/kementrian yang berasal dari dana APBN. Dengan adanya bantuan dana tersebut, setidaknya jumlah PMKS yang dapat dibantu jadi lebih banyak, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut antara lain:

1. Jumlah PMKS mengalami penurunan karena penghitungan jumlah fakir miskin tidak lagi mengambil desil dari DTKS, akan tetapi menggunakan data dari kemiskinan ekstrem.
2. Rendahnya keterampilan PMKS.
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun, bahkan bencana non alam yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam.
6. Tingginya minat PMKS untuk terus mendapatkan bantuan sehingga menyebabkan mental suka meminta.
7. Rendahnya keinginan PMKS untuk mengubah kondisi hidupnya karena terlalu nyaman dalam menikmati beragam bantuan dari pemerintah.

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan PMKS belum optimal	Masih tingginya angka kemiskinan	Ketergantungan fakir miskin terhadap bantuan masih tinggi
2.	Pemberdayaan PMKS belum optimal		Pemberdayaan sosial belum memfasilitasi seluruh jenis PMKS
			Upaya perlindungan terhadap korban bencana alam belum optimal
			Upaya pemberdayaan masyarakat miskin belum optimal
			Upaya pemberdayaan organisasi sosial di masyarakat belum optimal

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur)”. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar
3. Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang akuntabel inovatif dan berintegritas
4. Percepatan pembangunan melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Berdasarkan dokumen RPJMD diketahui bahwa tupoksi Dinas Sosial terikat pada misi pertama Bupati/ Wakil bupati yaitu “Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya”. Untuk mengetahui keberhasilan misi tersebut, digunakanlah suatu instrumen untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan misi pertama Bupati/Wakil Bupati terpilih. Instrumen tersebut kemudian ditetapkan sebagai sasaran misi, yaitu “Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial” dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penurunan PMKS”. Persentase penurunan PMKS dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah PMKS tahun } n-1 - \text{jumlah PMKS tahun } n}{\text{jumlah PMKS tahun } n-1} \times 100\%$.

Dalam rangka menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial yaitu sebagai pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial maka dapat dirumuskan beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu :

Faktor pendorong :

1. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

2. Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
3. Adanya bantuan dana dari pemerintah pusat (APBN)
4. Adanya pengembangan teknologi dan aplikasi yang memudahkan dalam pendataan PMKS

Faktor penghambat :

1. Pertambahan PMKS dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.
2. Rendahnya keterampilan PMKS.
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam.
6. Tingginya minat PMKS untuk terus mendapatkan bantuan sehingga menyebabkan mental suka meminta.
7. Rendahnya keinginan PMKS untuk merubah kondisi hidupnya karena terlalu nyaman dalam menikmati beragam bantuan dari pemerintah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu acuan bagi penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan agar program/ kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar tetap linier dengan program/ kegiatan Dinas Sosial Provinsi sehingga ketika pemerintah pusat menghendaki capaian dari program/ kegiatan yang disusun oleh Kementrian Sosial, pemerintah kabupaten dapat melaporkan sesuai dengan breakdown program/ kegiatan tersebut.

Dinas Sosial Provinsi telah menetapkan sasaran strategis yang dimuat dalam renstra Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tabel 3.1

**Permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Berdasarkan Sasaran Renstra
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov.Jatim	Permasalahan Pelayanan Dinsos Kab.Blitar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PMKS)	Tingginya jumlah PMKS	Jumlah pertambahan PMKS yang dapat terjadi sewaktu-waktu, juga adanya kemiskinan ekstrem	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
		Terbatasnya jumlah bantuan yang bisa diberikan karena keterbatasan anggaran	Rendahnya keterampilan PMKS	Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
		Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja	Adanya bantuan dana dari pemerintah pusat (APBN)
			Tingginya frekuensi terjadinya	Adanya pengembangan teknologi dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov.Jatim	Permasalahan Pelayanan Dinsos Kab.Blitar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bencana dalam satu tahun	aplikasi yang memudahkan dalam pendataan PMKS
			Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam	
			Tingginya minat PMKS untuk terus mendapatkan bantuan sehingga menyebabkan mental suka meminta	
			Rendahnya keinginan PMKS untuk merubah kondisi hidupnya karena terlalu nyaman dalam menikmati beragam	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov.Jatim	Permasalahan Pelayanan Dinsos Kab.Blitar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bantuan dari pemerintah	

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki arah kebijakan yang selaras dengan renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Saat Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), maka renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar mencanangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa tujuan penataan wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pembangunan 5 tahun mendatang. Jika dihubungkan dengan tupoksi dari masing- masing OPD, Dinas Sosial tidak memiliki keterkaitan tupoksi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada tingkat Pemerintah Provinsi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan telaah analisa permasalahan, isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Jumlah PMKS mengalami penurunan karena penghitungan jumlah fakir miskin tidak lagi mengambil desil dari DTKS, akan tetapi menggunakan data dari kemiskinan ekstrem.
2. Rendahnya keterampilan PMKS.
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam.
6. Tingginya minat PMKS untuk terus mendapatkan bantuan sehingga menyebabkan mental suka meminta.
7. Rendahnya keinginan PMKS untuk merubah kondisi hidupnya karena terlalu nyaman dalam menikmati beragam bantuan dari pemerintah.
8. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
9. Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
10. Adanya bantuan dana dari pemerintah pusat (APBN) dan dari pemerintah provinsi (APBD 1)
11. Adanya pengembangan teknologi dan aplikasi yang memudahkan dalam pendataan PMKS

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar OPD secara langsung dapat mendukung ketercapaian visi misi Kabupaten Blitar. Penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial sangat penting, mengingat dari tujuan dan sasaran OPD ini nantinya akan membantu mencapai visi/misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya tujuan dan sasaran OPD, maka akan menjadi dasar penyusunan program/ kegiatan OPD selama 5 tahun kedepan.

Mengacu pada telaah visi misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar juga tidak terlepas dari apa yang menjadi cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang tertuang dalam visi misi dan panca kemuliaan Kepala Daerah Kabupaten Blitar. Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia”. Dari rumusan Visi dan Misi kepala daerah yang telah tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar merumuskan tujuan yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu “Menurunnya angka PMKS”.

Untuk itulah, dalam pembuatan tujuan dan sasaran Dinas Sosial ini sangat penting untuk mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Sosial memiliki 1 tujuan yaitu Menurunnya angka PMKS, dengan 1 sasaran yaitu Meningkatnya kesejahteraan PMKS. Berikut adalah tabel kesesuaian antara tujuan RPJMD dengan tujuan OPD.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunnya angka PMKS		Persentase penurunan angka PMKS	2%	2%	2%	2%	2%
		Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

		kesejahteraan PMKS	PMKS yang tertangani					
--	--	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki 1 tujuan yang dapat dicapai melalui 1 sasaran. Masing-masing tujuan dan sasaran telah dilengkapi dengan indikator, sehingga bisa diukur pencapaian kinerjanya di setiap tahun anggaran. Untuk tujuan Dinas Sosial **Menurunnya Angka PMKS** dengan indikator tujuan yaitu **Persentase penurunan angka PMKS** dengan target sebesar **2%** setiap tahunnya sehingga pada ahir tahun Renstra diperoleh capaian penurunan angka PMKS sebesar **10%** dari tahun ke 0. Kemudian untuk sasaran Dinas Sosial **Meningkatnya Kesejahteraan PMKS** dengan indikator sasaran yaitu **Persentase PMKS yang tertangani** dengan target sebesar **100%** setiap tahunnya. Namun karena sifat target tersebut adalah tetap di setiap tahun, maka capaian PMKS yang tertangani tetap **100%** hingga ahir tahun Renstra.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dengan program- program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal OPD. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal OPD, sedangkan *Opportunity* (O) dan *Threat* (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi OPD dari luar. Berikut tabel analisis SWOT Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Tabel 5.1
Analisa SWOT Dinas Sosial

	PELUANG	TANTANGAN
	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Rendahnya keterampilan PMKS
	Adanya bantuan dari OPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
KEKUATAN		Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam
Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anggaran yang diterima Dinas Sosial	<i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada</i>	<i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru</i>
Adanya kecenderungan menurunnya jumlah PMKS secara total dari tahun ke tahun		<i>Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam</i>
KELEMAHAN	<i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan</i>	<i>Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri</i>
Rendahnya kualitas dan kuantitas penanganan PMKS		
Keterbatasan SDM sehingga data PMKS kurang akurat akurat		
Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PMKS		

Dari tabel tersebut, diperoleh 5 strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada (O-S)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru (T-S)
3. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam (T-S)
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan (O-W)
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri (T-W)

Strategi- strategi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada.

Kabupaten Blitar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.231.010 jiwa (sumber BPS 2022). Besarnya jumlah PMKS sementara anggaran yang ada di pemerintah daerah terbatas mengakibatkan hanya sekitar 11% saja dari total PMKS yang bisa diberi bantuan dan penanganan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Blitar sangat membutuhkan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat (APBN) maupun dari pemerintah provinsi (APBD I). Seluruh bantuan tersebut diberikan secara langsung kepada PMKS, dengan dibantu fasilitasi oleh Dinas Sosial dan PSKS (utamanya PKH dan TKSK). Dengan meningkatkan kualitas PSKS maka diharapkan kualitas penyaluran bantuan sosial dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru.

Dari 26 golongan PMKS, golongan yang paling besar berasal keluarga fakir miskin. Suatu keluarga bisa menjadi fakir miskin dikarenakan banyak faktor, di antaranya kurangnya keterampilan

manusia tersebut dalam bekerja sehingga yang awalnya mungkin tidak miskin akhirnya menjadi miskin. Kemudian kurangnya informasi terkait lapangan kerja yang ada karena terbatasnya akses informasi, komunikasi dan sosialisasi dari pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja semakin memperparah kondisi keluarga fakir miskin yang berada di daerah pelosok. Untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS sehingga walaupun PMKS tersebut tidak bekerja pada orang lain, mereka masih dapat membuka usaha-usaha baru yang berpeluang menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya.

3. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

Korban bencana alam merupakan salah satu dari 26 golongan PMKS yang selalu memerlukan penanganan dan/atau bantuan sesegera mungkin, minimal bantuan untuk makanan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Blitar yang menyebabkan Kabupaten Blitar sering mengalami bencana alam seperti yang sudah dijelaskan di bab.3. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana menyebabkan jumlah PMKS meningkat karena korban bencana alam kurang memahami apa saja yang harus dilakukan untuk keluar dari masalah bencana alam. Ketika hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka bukan tidak mungkin jumlah keluarga fakir miskin akan bertambah sebagai akibat habisnya harta benda/modal mereka saat terjadi bencana. Bisa dikatakan, mereka akan menyandang gelar ganda PMKS, dari yang hanya korban bencana alam menjadi keluarga fakir miskin juga. Untuk itulah, meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam diharapkan menjadi solusi dan mencegah munculnya PMKS-PMKS baru sebagai akibat tingginya frekuensi bencana alam di Kabupaten Blitar.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan.

Untuk meningkatkan jumlah PMKS yang dapat dibantu dan/atau ditangani dalam setiap tahunnya, diperlukan optimalisasi kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia/aparatur negara yang terjun langsung menangani PMKS di lapangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab 2 bahwasanya jumlah SDM terampil di Dinas Sosial memang mengalami kekurangan jumlah dan masih jauh di bawah angka ideal. Hal inilah yang menyebabkan satu orang staf mengalami beban pekerjaan berlebih sehingga pada implementasinya menjadi kurang maksimal.

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri.

Pada tahun 2022, beberapa program bantuan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan melibatkan IT dan aplikasi, seperti aplikasi SIKS-NG dan SIDAKSOS. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu dilaksanakan oleh Dinas Sosial sangat diperlukan. Misalnya pada kegiatan update jumlah data PMKS yang ada di 22 kecamatan se Kabupaten Blitar. Keterbatasan staf dengan banyaknya pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa melakukan update data PMKS ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Blitar dengan maksimal, seandainya bisa pun tentu data yang diperoleh tidak akurat. Untuk keperluan itulah Dinas Sosial memerlukan bantuan dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Dengan adanya TKSK, maka Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator kegiatan saja, sedangkan pelaksana teknis di lapangan adalah TKSK. Dengan melakukan strategi pihak ketiga ini diharapkan proses-proses validasi data PMKS di lapangan menjadi lebih optimal dan diperoleh data PMKS yang akurat.

5.2. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing perspektif adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar

No	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif masyarakat		
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial
4	Perspektif keuangan		
No	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian	

		bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Program Penanganan Bencana
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan	Meningkatkan ketepatan data DTKS melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan PSKS lainnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Perspektif keuangan		
No	Perspektif	Strategi 3: Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif masyarakat	Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan serta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan		
4	Perspektif keuangan		

Berdasarkan analisa BSC dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki 4 kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan pemberdayaan sosial di masyarakat
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
3. Meningkatkan ketepatan data DTKS melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan PSKS lainnya
4. Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan serta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Kebijakan yang telah dihasilkan oleh BSC yang bersumber dari strategi harus dapat linier dengan Tujuan dan Sasaran OPD. Berikut matriks linieritas antara tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI: Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia			
MISI: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan	Meningkatkan Pemberdayaan Sosial di Masyarakat
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
			Meningkatkan ketepatan data DTKS melalui kerjasama dengan pemerintah desa dan PSKS lainnya
		Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh OPD secara mandiri	Meningkatkan keterampilan melalui pelatihan serta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Tabel 5.1
Matriks Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	6.375.149.022
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun</i>	2.273.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.089.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.184.000
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.239.237.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.197.505.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.732.000
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	946.695.692
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82.369.152
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24.146.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.180.540
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	739.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>216.368.000</i>
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	216.368.000
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi</i>	<i>488.998.000</i>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.722.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	71.224.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	412.052.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara</i>	<i>481.577.330</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	200.392.500
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85.129.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	196.055.830
	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	1.436.154.258
			<i>Perlindungan Sosial Korban</i>	<i>Persentase Korban Bencana Yang</i>	<i>656.676.258</i>

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			<i>Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana</i>	
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	596.676.258
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	14.319.888
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.579.500
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	14.100.612

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</i>	779.478.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	360.209.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	419.269.000
	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	100.000.000
			<i>Pemulangan Warga Negara Migran</i>	<i>Persentase Warga Negara Migran</i>	100.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			<i>Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal</i>	<i>Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi</i>	
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.753.864.627
			<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia</i>	<i>1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan</i>	<i>1.450.997.627</i>

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			<i>Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>gepeng yang dijangkau</i>	
				<i>2. Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis</i>	
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	230.504.000
			Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,	446.719.527

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Mental, Spiritual, dan Sosial	Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
			Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.750.000
			Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	302.867.000
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	59.944.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	82.450.000
			Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	20.000.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.045.000
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	75.428.000
	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	3.250.965.427
			<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kejadiannya</i>	<i>32.700.000</i>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	32.700.000

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
			<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan</i>	3.218.265.427
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	94.326.955
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	342.602.590
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2.728.327.877

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	53.008.005
	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	1.351.602.766
			<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi</i>	1.351.602.766
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	826.115.512
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan	430.487.254

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
				Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000
TOTAL					14.267.736.100

Tabel 5.2

Matriks Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	5.999.990.908	100%	6.186.888.000	100%	6.346.673.000	100%	6.506.491.000	100%	6.675.575.000	100%	31.715.617.908	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun</i>	9 Dokumen	9 Dokumen	2.148.000	9 Dokumen	2.211.000	9 Dokumen	2.273.000	9 Dokumen	2.336.000	9 Dokumen	2.402.000	9 Dokumen	11.370.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	1.029.000	3 dokumen	1.059.000	3 dokumen	1.089.000	3 dokumen	1.119.000	3 dokumen	1.151.000	3 dokumen	5.447.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah															
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	1.119.000	6 dokumen	1.152.000	6 dokumen	1.184.000	6 dokumen	1.217.000	6 dokumen	1.251.000	6 dokumen	5.923.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.784.586.000	100%	4.122.561.000	100%	4.239.237.000	100%	4.355.913.000	100%	4.479.194.000	100%	20.981.491.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang/bulan	38 orang/bulan	3.744.796.000	38 orang/bulan	4.081.977.000	38 orang/bulan	4.197.505.000	38 orang/bulan	4.313.032.000	38 orang/bulan	4.435.100.000	38 orang/bulan	20.772.410.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	6 dokumen	6 dokumen	39.790.000	6 dokumen	40.584.000	6 dokumen	41.732.000	6 dokumen	42.881.000	6 dokumen	44.094.000	6 dokumen	209.081.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
		SKPD															
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	100%	100%	691.432.938	100%	756.711.000	100%	760.015.000	100%	763.317.000	100%	766.809.000	100%	3.738.284.938	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	103.917.088	12 paket	81.113.000	12 paket	83.409.000	12 paket	85.704.000	12 paket	88.130.000	12 paket	442.273.088	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	41.022.500	12 paket	23.481.000	12 paket	24.146.000	12 paket	24.810.000	12 paket	25.513.000	12 paket	138.972.500	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	64.250.000	2 paket	12.117.000	2 paket	12.460.000	2 paket	12.803.000	2 paket	13.166.000	2 paket	114.796.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	40.000.000		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu															
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	48 laporan 482.243.350	48 laporan 555.000.000	48 laporan 555.000.000	48 laporan 555.000.000	48 laporan 555.000.000	48 laporan 555.000.000	48 laporan 555.000.000	48 laporan 555.000.000	48 laporan 555.000.000	48 laporan 555.000.000	48 laporan 2.702.243.350	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen		75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>50 Unit</i>	<i>50 Unit</i> 433.366.024	<i>50 Unit</i> 210.413.000	<i>50 Unit</i> 216.368.000	<i>50 Unit</i> 216.368.000	<i>50 Unit</i> 216.368.000	<i>50 Unit</i> 216.368.000	<i>50 Unit</i> 222.323.000	<i>50 Unit</i> 222.323.000	<i>50 Unit</i> 228.616.000	<i>50 Unit</i> 228.616.000	<i>50 Unit</i> 1.311.086.024	<i>Dinas Sosial</i>	<i>Dinas Sosial</i>	
	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan	50 unit	50 unit 433.366.024	50 unit 210.413.000	50 unit 216.368.000	50 unit 216.368.000	50 unit 216.368.000	50 unit 216.368.000	50 unit 222.323.000	50 unit 222.323.000	50 unit 228.616.000	50 unit 228.616.000	50 unit 1.311.086.024	Dinas Sosial	Dinas Sosial	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan															
																Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	5 Jasa	5 Jasa	535.530.00	5 Jasa	475.540.00	5 Jasa	488.998.00	5 Jasa	502.458.00	5 Jasa	516.677.00	5 Jasa	2.519.203.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 laporan	550 laporan	4.000.000	550 laporan	5.565.000	550 laporan	5.722.000	550 laporan	5.880.000	550 laporan	6.045.000	550 laporan	27.212.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	69.035.000	3 laporan	69.264.000	3 laporan	71.224.000	3 laporan	73.185.000	3 laporan	75.256.000	3 laporan	357.964.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Penyediaan	Jumlah	15	15	462.495.0	15	400.711.0	15	412.052.0	15	423.393.0	15	435.376.0	15	2.134.027	Dinas	Dinas

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	laporan	00	laporan	00	laporan	00	laporan	00	laporan	00	laporan	.000	Sosial	Sosial
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara</i>	<i>77 Buah</i>	<i>77 Buah</i>	<i>552.927.946</i>	<i>77 Buah</i>	<i>619.452.000</i>	<i>77 Buah</i>	<i>639.782.000</i>	<i>77 Buah</i>	<i>660.144.000</i>	<i>77 Buah</i>	<i>681.877.000</i>	<i>77 Buah</i>	<i>3.154.182.946</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>Dinas Sosial</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 kendaraan	26 kendaraan	191.910.000	26 kendaraan	269.069.000	26 kendaraan	279.483.000	26 kendaraan	289.928.000	26 kendaraan	301.183.000	26 kendaraan	1.331.573.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	31.850.000	50 unit	82.786.000	50 unit	85.129.000	50 unit	87.472.000	50 unit	89.948.000	50 unit	377.185.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	329.167.946	1 unit	267.597.000	1 unit	275.170.000	1 unit	282.744.000	1 unit	290.746.000	1 unit	1.445.424.946	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	100%	100%	10.907.151.000	100%	1.219.764.079	100%	1.334.748.454	100%	1.338.195.913	100%	1.346.180.687	100%	16.146.040.133	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blit

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi	100%	100%	10.907.151.000	100%	1.219.764.079	1	1.334.748.454	1	1.338.195.913	1	1.346.180.687	100%	16.146.040.133	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab. Blitar
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	134.416 Orang	562076 orang	871.398.000	562076 orang	830.658.000	562076 orang	854.168.000	562076 orang	877.677.000	562076 orang	902.518.000	562076 orang	4.336.419.000		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	45.396 KPM	96000 keluarga	289.050.500	96000 keluarga		96000 keluarga		96000 keluarga		96000 keluarga		96000 keluarga			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	45.396 KPM	9600 keluarga	3.000.000.000	9600 keluarga	339.106.079	9600 keluarga	430.580.454	9600 keluarga	410.518.913	9600 keluarga	393.662.687	9600 keluarga	4.573.868.133		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
	Fasilitasi Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kelompok	50 orang	6.746.702.500	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	6.946.702.500			
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	170%	100%	1.048.536.500	100%	1.312.735.663	100%	1.436.484.258	100%	1.440.194.485	100%	1.448.787.866	100%	6.686.738.772	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blit	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
		darurat bencana daerah kabupaten															
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	100%	100%	298.836.500	100%	554.389.663	100%	656.676.258	100%	638.923.485	100%	624.838.866	100%	2.773.664.772	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	17.300 Orang	1000 orang	283.836.500	1000 orang	494.389.663	1000 orang	596.676.258	1000 orang	578.923.485	1000 orang	564.838.866	1000 orang	2.518.664.772	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan	n/a	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	75.000.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota																se-Kab.Blitar
	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	100 orang	0	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	120.000.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	n/a	100 orang	0	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000	100 orang	60.000.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota																Kab.Blitar
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	n/a	60%	749.700.000	60%	758.346.000	100%	779.808.000	100%	801.271.000	100%	823.949.000	100%	3.913.074.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	4 kampung	265.204.000	4 kampung	350.295.000	6 kampung	360.209.000	6 kampung	370.123.000	6 kampung	380.599.000	6 kampung	1.726.430.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	Koordinasi, Sosialisasi dan	Jumlah Orang yang	44 Orang	40 orang	484.496.000	40 orang	408.051.000	40 orang	419.599.000	40 orang	431.148.000	40 orang	443.350.000	40 orang	2.186.644.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota																atan se-Kab.Blitar
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	n/a	100%	66.407.500	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	466.407.500	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk</i>	<i>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi</i>	n/a	100%	66.407.500	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	466.407.500	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	<i>dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal</i>																
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	100 orang	66.407.500	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	516.407.500	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	100%	100%	777.157.450	100%	932.182.941	100%	1.080.090.527	100%	1.082.725.271	100%	1.088.827.688	100%	4.960.983.877	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti																
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	n/a	100%	519.062.600	100%	637.681.941	100%	777.223.527	100%	771.522.271	100%	768.775.310	100%	3.474.265.649	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab. Blitar	
		2. Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab. Blitar	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		<i>Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis</i>																
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 orang 120.787.200	200 orang 221.408.000	200 orang 230.504.000	200 orang 239.601.000	200 orang 249.445.000	200 orang 1.061.745.200							Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	n/a	30 orang 10.000.000	30 orang 10.000.000	30 orang 10.000.000	30 orang 10.000.000	30 orang 10.000.000	30 orang 50.000.000							Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blit	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
		Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota																ar
	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	15 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	30.000.000	15 orang	150.000.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	40 orang	304.642.000	40 orang	316.273.941	40 orang	446.719.527	40 orang	431.921.271	40 orang	419.330.310	40 orang	1.918.887.049	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	Pemberian akses ke	Jumlah Orang yang	8 Orang	10 orang	8.081.200	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	10.000.000	10 orang	48.081.200	Dinas Sosial	22 Kecamatan	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)					
	layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota																atan se-Kab.Blitar
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	5 orang	0	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	40.000.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
		a															
	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kot a	10 orang	20 orang 35.552.600	20 orang 30.000.000	20 orang 30.000.000	20 orang 30.000.000	20 orang 30.000.000	20 orang 30.000.000	20 orang 30.000.000	20 orang 30.000.000	20 orang 30.000.000	20 orang 155.552.600	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar		
	Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	21 Orang	20 orang 9.999.600	20 orang 10.000.000	20 orang 10.000.000	20 orang 10.000.000	20 orang 10.000.000	20 orang 10.000.000	20 orang 10.000.000	20 orang 10.000.000	20 orang 49.999.600	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar			
	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan</i>	<i>Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>	<i>4 Jenis Layanan</i>	<i>4 Jenis Layanan 258.094.850</i>	<i>4 Jenis Layanan 294.501.000</i>	<i>4 Jenis Layanan 302.867.000</i>	<i>4 Jenis Layanan 311.203.000</i>	<i>4 Jenis Layanan 320.052.378</i>	<i>4 Jenis Layanan 1.486.718.228</i>	<i>4 Jenis Layanan</i>	<i>4 Jenis Layanan</i>	<i>4 Jenis Layanan</i>	<i>4 Jenis Layanan</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>22 Kecamatan se-Kab.Blitar</i>		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	<i>NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>															
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a	142 Paket	100 orang	67.742.500	100 orang	58.294.000	100 orang	59.944.000	100 orang	61.593.000	100 orang	63.336.378	100 orang	310.909.878	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan	100 Keluarga	100 orang	54.644.650	100 orang	79.630.000	100 orang	82.450.000	100 orang	85.270.000	100 orang	88.290.000	100 orang	390.284.650	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota															
	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	34 orang	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 20.000.000	30 orang 100.000.000	30 orang 100.000.000	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	15 orang 59.097.800	15 orang 63.225.000	15 orang 65.045.000	15 orang 66.836.000	15 orang 68.728.000	15 orang 68.728.000	15 orang 68.728.000	15 orang 68.728.000	15 orang 68.728.000	15 orang 322.931.800	15 orang 322.931.800	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar	
	Kerjasama antar Lembaga dan	Jumlah Dokumen Hasil	2 Kerjasam	2 dokum 56.609.900	2 dokum 73.352.000	2 dokum 75.428.000	2 dokum 77.504.000	2 dokum 79.698.000	2 dokum 79.698.000	2 dokum 79.698.000	2 dokum 79.698.000	2 dokum 79.698.000	2 dokum 362.591.900	2 dokum 362.591.900	Dinas Sosial	22 Kecamatan	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	a	en		en		en		en		en		en			atan se-Kab.Blitar
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	100%	100%	2.956.275.200	100%	2.576.983.679	100%	2.929.369.648	100%	2.936.935.778	100%	2.954.459.945	100%	14.354.024.250	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>41.109.800</i>	<i>100%</i>	<i>31.800.000</i>	<i>100%</i>	<i>32.700.000</i>	<i>100%</i>	<i>33.600.000</i>	<i>100%</i>	<i>34.551.000</i>	<i>100%</i>	<i>173.760.800</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>22 Kecamatan se-Kab.Blitar</i>

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	31 Penyelenggara	75 dokumen	41.109.800	75 dokumen	31.800.000	75 dokumen	32.700.000	75 dokumen	33.600.000	75 dokumen	34.551.000	75 dokumen	173.760.800	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan</i>	100%	100%	2.915.165.400	100%	2.545.183.679	100%	2.896.669.648	100%	2.903.335.778	100%	2.919.908.945	100%	14.180.263.450	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	22 Orang	22 orang	81.798.450	22 orang	63.713.000	22 orang	65.517.000	22 orang	67.320.000	22 orang	69.227.000	22 orang	347.575.450	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
		Kabupaten/Kota															
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	23 orang	352.722.100	23 orang	251.253.000	23 orang	258.364.000	23 orang	265.475.000	23 orang	272.989.000	23 orang	1.400.803.100	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	113 Orang	27 lembaga	2.342.127.350	27 lembaga	2.105.222.679	27 lembaga	2.444.256.648	27 lembaga	2.438.470.778	27 lembaga	2.441.884.945	27 lembaga	11.771.962.400	Dinas Sosial	22 Kecamatan se-Kab.Blitar
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil	n/a	17 sertifikat	138.517.500	17 sertifikat	124.995.000	17 sertifikat	128.532.000	17 sertifikat	132.070.000	17 sertifikat	135.808.000	17 sertifikat	659.922.500	Dinas Sosial	22 Kecamatan

Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Capaian Kinerja Dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah Penang gung Jawab	Lokasi
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Pagu (Rp)		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
	Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kot a															se- Kab.Blit ar
TOTAL					21.755.51 8.558	12.328.55 4.362	13.227.36 5.887	13.404.54 2.447	13.613.83 1.186	74.329.81 2.440							

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tercakup dalam misi pertama yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya. Adapun sasaran yang mengarah pada misi tersebut dan terkait dengan tupoksi Dinas Sosial adalah “meningkatnya kesejahteraan PMKS”. Kedua sasaran tersebut dicapai melalui 5 program dengan indikator dan target capaiannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti							
4	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator tersebut dirumuskan berdasar atas beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Tingginya jumlah PMKS
2. Rendahnya keterampilan PMKS
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun

5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam
6. Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat
7. Rendahnya kualitas dan kuantitas bantuan dan penanganan PMKS
8. Kurangnya SDM yang berkualitas sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS

BAB VIII

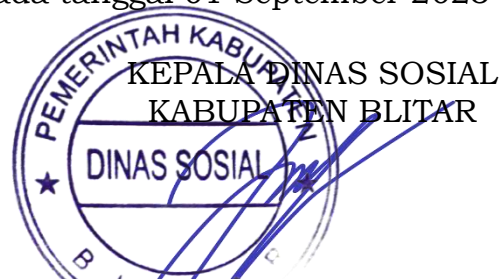
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 ini pada dasarnya menjabarkan perencanaan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana perkembangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2021-2026); bagaimana mencapainya; dan langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program tercapai sesuai yang direncanakan. Perencanaan Strategis inilah yang akan mewarnai sepak terjang Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada masa yang akan datang secara terencana dan terarah demi mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam VISI pemerintah daerah.

Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu atau berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kegiatan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui dana APBD/APBN maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Rencana Strategis ini berlaku untuk 5 tahun mendatang diharapkan menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kab.Blitar dan masyarakat, termasuk dunia usaha di tingkat Kabupaten. Rencana Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial ini pada dasarnya masih membuka peluang bagi penyelenggara di lapangan untuk melakukan inovasi pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 01 September 2023



BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760204 199612 1 001

